

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adjie, Habib, 2015, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT Rafika Aditama, Bandung

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Andasasmita, Komar, 1981, *NOTARIS I*, Sumur Bandung, Bandung

Ansori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, UII Pers, Yogyakarta

Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawaban Jabatan Notaris*, UUI Pres, Yogyakarta

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta

Hamza, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Yogyakarta

Harris, Freddy dan Leny Helena, 2007, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja Jakarta Pusat

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

Mulyoto, 2011, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dkuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta

Sajifurrachman dan Habib Adjie, 2011, “*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*”, Cv. Mandar Maju , Bandung, hlm. 21

Shodiq, Muhammad dan Imam muttaqien, 2007, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sukanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI – Press, Jakarta

Thamrin, Husni , 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-Pw.07-10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.10-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015, Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

### C. Karya Ilmiah / Jurnal / Internet

Aji, Andiko Trio, 2012, “Sanksi Administratif terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan notaris yang melakukan tindak pidana yang putusnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Febriani, Yani , 2014, “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 tahun atau telah meninggal dunia di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tenrisana, Annisa Amelia, 2017,” Pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap sanksi pelanggaran jabatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kabar Progresif, “Notaris intiana divonis 15 bulan penjara”, <http://www.kabarprogresif.com/2017/02/notaris-intiana-divonis-15-bulan-penjara.html>, diakses tanggal 25 Januari 2018.

Merdeka, Notaris Tri Indarwati perlakukan staf seperti suami simpanan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/notaris-tri-indarwati-perlakukan-staf-seperti-suami-simpanan.html>, disakses tanggal 25 Januari 2018.

Merdeka, “Notaris di Riau sebut hakim gila lantaran divonis 20 bulan penjara”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/notaris-di-riau-sebut-hakim-gila-lantaran-divonis-20-bulan-penjara.html>, diakses tanggal 25 Januari 2018.